

**STRUKTUR BENDUNGAN BATUBASSI TINGGALAN KOLONIAL
BELANDA DI KABUPATEN MAROS**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada
Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin
Oleh :

ASRI AISYAH

F611 16 303

**DEPARTEMEN ARKEOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN

UNIVERSITAS HASANUDDIN FAKULTAS ILMU BUDAYA

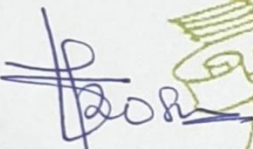
LEMBAR PENGESAHAN

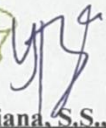
Sesuai Surat Tugas Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Nomor:
2535/UN4.9.1/KEP/2022, tanggal **29 Desember 2022**, dengan ini kami
menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.


Makassar, 27 Januari 2023

Pembimbing I

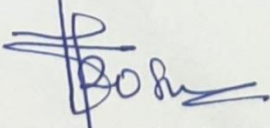
Pembimbing II


Dr. Rosmawati, S.S., M.Si.
Nip. 197205022005012002


Yusriana, S.S., M.A.
Nip. 198407042014042001


Disetujui untuk diteruskan
Kepada Panitia Ujian Skripsi.
Dekan,

u.b. Ketua Departemen Arkeologi
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin


Dr. Rosmawati, S.S., M.Si.
Nip. 197205022005012002

SKRIPSI

**STRUKTUR BENDUNGAN BATUBASSI TINGGALAN KOLONIAL
BELANDA DI KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

**Asri Aisyah
F61116303**

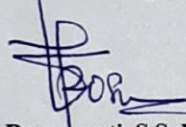
Telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi

Pada tanggal 26 Mei 2023

Dinyatakan telah memenuhi syarat

**Menyetujui
Komisi Pembimbing,**

Pembimbing I



Dr. Rosmawati, S.S., M.Si.
Nip: 197205022005012002

Pembimbing II



Yusriana, S.S., M.A.
Nip: 198407042014042001

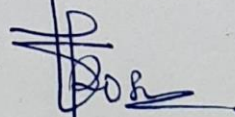
Dekan

Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Akin Duli, M.A.
Nip: 196407161991031010

Ketua Departemen Arkeologi
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin



Dr. Rosmawati, S.S., M.Si.
Nip: 197205022005012002

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU BUDAYA**

Pada hari Selasa, 13 Juni 2023 Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik Skripsi yang berjudul :

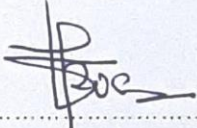

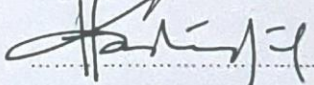
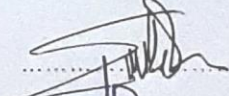
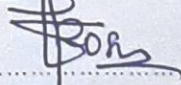

**STRUKTUR BENDUNGAN BATUBASSI TINGGALAN KOLONIAL
BELANDA DI KABUPATEN MAROS**

Yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin.



05 Juni 2023

Panitia Ujian Skripsi

- | | | |
|--|---------------|---|
| 1. Dr. Rosmawati, M.Si. | Ketua |  |
| 2. Yusriana, S.S.,M.A. | Sekretaris |  |
| 3. Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si. | Penguji I |  |
| 4. Dott. Erwin Mansyur Ugu Saraka,
M.Sc.,Arch.,MatSc. | Penguji II |  |
| 5. Dr. Rosmawati, M.Si. | Pembimbing I |  |
| 6. Yusriana, S.S.,M.A. | Pembimbing II |  |

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Asri Aisyah

NIM : F61116303

Program Studi : Arkeologi

Fakultas/Universitas : Ilmu Budaya/Hasanuddin

Judul Skripsi : Struktur Bendungan Batubassi Tinggalan Kolonial Belanda Di
Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sungguh-sungguhnya serta sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri kecuali kutipan yang semuanya telah dijelaskan sumbernya. Apabila dikemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas Hasanuddin batal saya terima

Makassar, Juni 2023

Yang membuat pernyataan,


ASRI AISYAH

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kehadiran Allah *Subhana wa Ta'ala* atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, sosok nabi terakhir yang telah membawa umat manusia dari lembah kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Tidak terluput salam kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa menjadi pengikutnya.

Penulisan skripsi dengan judul “Struktur Bendungan Batubassi Tinggalan Kolonial Belanda di Kabupaten Maros” diselesaikan sebagai sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin. Skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, pembaca, serta dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu Arkeologi.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.** beserta seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Prof. Dr. Akin Duli, M.A beserta seluruh jajarannya.
3. Ketua Departemen Arkeologi, Dr. Rosmawati, S.S., M.Si. dan Sekretaris Departemen Arkeologi, Yusriana, S.S., M.A, serta seluruh staf pengajar Departemen Arkeologi kepada Dr. Hasanuddin, M.A, Dr. Anwar Toshibo,

M.Hum, Prof. Akin Duli, M.A., Dr. Erni Erawati, MSi, Dr. Khadijah Thahir Muda, Msi, Supriadi, S.S., M.A, Yadi Mulyadi, S.S., M.A, Asmunandar, S.S., M.A, Nur Ihsan Patunru S.S., M.Hum., Drs. Iwan Sumantri, M.A., M.Si., Dr. Muhlis, M.Hum., M. Bahar Akkase Teng, Lcp., M.Hum., Dr. Eng. Ilham Alimuddin, S.T., M.Gis., Ir. H. Djamaluddin, M.T dan Dr. Muhammad Nur, S.S., M.A yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis untuk kedepannya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Syarifuddin, S.E yang telah membantu pengurusan akademik penulis selama menjadi mahasiswa di Departemen Arkeologi.

4. Terima kasih kepada ibu Dr. Erni Erawati, MSi, selaku Penasehat Akademik.
5. Terima kasih kepada ibu Dr. Rosmawati, S.S., M.Si. selaku pembimbing I dan ibu Yusriana, S.S., M.A selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dosen penguji Dr. Khadijah Thahir Muda, M.Si, sebagai penguji I dan Dott. Erwin Mansyur Ugu Saraka, M.Arch., MatSc., sebagai penguji II yang telah memberikan saran serta kritik yang membangun kepada penulis.
7. Pak Syarifuddin serta seluruh staf FIB UNHAS Makassar atas pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjalankan masa studi.
8. Pendamping Landasstular Kelompok 4 Syarafat dan Sitti Fatimah Karti serta teman-teman setenda “*TAHANG BANTIN*” slayer hijau, ketua kelompok Muh. Nur Zulfikar Yunus, S.Hum dan kami para anggotanya Alma Rahmadaning ayu, S.S, Rezkiwanasilvia Bakri, S.S, Iftitah Suling, S.S, Musfirah. Terima

kasih pengalaman berharganya, yang tidak akan saya lupakan seumur hidup, kalian adalah orang hebat.

9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis, Elma Suriana, S.S., Rezkiwanasilvia Bakri, S.S., Awuliya Rachma Ibrahim, S.S., Rezki Yulianti Bahtiar, S.S., Riska Faradillah Nazar, S.S., Andi Adilla Tenri, S.S dan Alma Rahmadaning Ayu Widhodo, S.S serta keluarga besar Landbridge 2016. Kalian semua hebat, *see you on top guys*.
10. Tim survei dan tim penelitian, Rezkiwanasilvia Bakri, S.S., Awuliya Rachma Ibrahim, S.S., Rezki Yulianti Bahtiar, S.S., Riska Faradillah Nazar, S.S., Andi Adilla Tenri, S.S., Alma Rahmadaning Ayu Widhodo, S.S dan Fahran Reza, S.S.
11. Keluarga Mahasiswa Arkeologi (Kaisar) FIB-UH yang telah menjadi tempat belajar untuk penulis selama menjadi mahasiswa. Bertemu keluarga baru dan berpetualang bersama adalah pengalaman paling berharga. Terima Kasih Kaisar untuk perjalanan panjang seperti *Roller Coaster*, saya pulang dengan kenangan indah *scarft* merah.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dengan dukungan, doa, motivasi sehingga penulis terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.
13. Ayahanda **H. Amus Muis** dan Ibunda **Hj. Rahmatia**. Terima kasih atas doa, ketulusan hati dan restu yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis. Untuk saudara-saudaraku **Rizky Amaliah, Dwi Fajrianty, Nur Ikhzan Hidayat, Ahmad Junaidi** yang selalu sabar dan selalu ada serta rela mengorbankan banyak hal kepada penulis.

Tak terlupakan ponakan ponakanku **Waiz Robbani Zhafir, Afrahim Rafanda, Dzikri Al-Fatih H, Ayyub Al-Anshari H** yang selalu jadi *mood booster* bagi penulis.

Makassar, April 2023

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	6
1.3 Tujuan dan Manfaat	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Manfaat	7
1.4 Metode penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	9
1.6 Tinjauan Pustaka.....	9
BAB II PROFIL WILAYAH PENELITIAN DAN SEJARAH SINGKAT KABUPATEN MAROS	15
2.1 Letak dan Kondisi Geografis	15
2.2 Sejarah Singkat Kabupaten Maros.....	21
2.3 Kolonisasi di Kabupaten Maros.....	27

BAB III STRUKTUR DAN KOMPONEN BENDUNGAN BATUBASSI.....	30
3.1 Deskripsi Struktur Bendungan Batubassi	30
3.2 Komponen Bendungan	38
BAB IV KARAKTERISTIK DAN PERANAN STRUKTUR BENDUNGAN BATUBASSI BAGI MAROS PADA PERIODE KOLONIAL BELANDA	50
4.1 Karakteristik Bendungan Batubassi.....	50
4.2 Peranan Bendungan Batubassi.....	53
BAB V PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar 1	Peta Administrasi Kabupaten Maros.....	16
Gambar 2	Bendungan Batubassi.....	30
Gambar 3	Peta Lokasi Penelitian dan Jaringan Irigasi	31
Gambar 4	Akses Menuju Bendungan.....	32
Gambar 5	Sebelah Barat Bendungan.....	33
Gambar 6	Sebelah Timur Bendungan.....	33
Gambar 7	Sebelah Utara Bendungan.....	34
Gambar 8	Sebelah Selatan Bendungan.....	34
Gambar 9	Daerah Irigasi Bendungan Batubassi Kab. Maros.....	36
Gambar 10	Bendung Batubassi.....	38
Gambar 11	Bendung Batubassi dengan Jembatan Gantung diatasnya.....	39
Gambar 12	Jembatan Gantung Tampak Selatan.....	40
Gambar 13	Jembatan Gantung Bagian Depan.....	40
Gambar 14	Detail Jembatan Gantung Ciri Peninggalan Belanda.....	40
Gambar 15	<i>Hoist</i> Pintu <i>Intake</i> Kanan.....	41
Gambar 16	Pintu <i>Intake</i> Kanan.....	41
Gambar 17	<i>Hoist</i> dan Pintu <i>Intake</i> Kiri.....	42
Gambar 18	<i>Peil Scale</i>	42
Gambar 19	Bak Penampungan Air.....	43
Gambar 20-21	Tangga Operasional.....	44

Gambar 22	Alat Pengukur Curah Hujan (Provinsi).....	45
Gambar 23	Alat Pengukur Curah Hujan (BMKG).....	45
Gambar 24	<i>Hoist</i> Pintu Penguras.....	45
Gambar 25	Pintu Penguras.....	45
Gambar 26	Mercu Ambang Lebar (Utara).....	46
Gambar 27	Mercu Ambang Lebar (Barat).....	46
Gambar 28	Mercu Ogee.....	47
Gambar 29	Pintu Air Jaringan Tersier.....	47
Gambar 30	<i>Hoist</i> Jaringan Tersier.....	48
Gambar 31	Pintu Air Jaringan Sekunder.....	48
Gambar 32	<i>Hoist</i> Jaringan Sekunder.....	49
Gambar 33	Tipe Mercu Ogee.....	51
Gambar 34	Saluran Irigasi di Maros.....	56
Gambar 35	Bendungan Batubassi pada Tahun 1935.....	57
Gambar 36	Bendungan Batubassi Saat Ini.....	57
Gambar 37	Daerah Irigasi Bendungan Batubassi Kab. Maros.....	60

ABSTRAK

Asri Aisyah, “Struktur Bendungan Batubassi Tinggalan Kolonial Belanda di Kabupaten Maros” dibimbing oleh **Rosmawati** dan **Yusriana**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik bendungan Batubassi dan bagaimana peranannya terhadap wilayah Maros pada periode kolonial Belanda. Permasalahan yang diajukan yaitu bagaimana karakteristik bendungan Batubassi di Maros dan bagaimana peranan bendungan Batubassi pada periode kolonial Belanda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode arkeologi dengan pendekatan Arkeologi Sejarah. Adapun tahapan penelitian yaitu pertama pengumpulan data yang terdiri dari studi pustaka, observasi lapangan dan wawancara; kedua pengolahan data dan interpretasi data. Setelah melakukan analisis metode analisis morfologis dan tipologis diperoleh hasil bahwa Struktur Bendungan Batubassi merupakan bendungan dengan konstruksi batu sungai yang diperkuat dengan campuran semen dengan tipe bendungan kecil, mercu bendung tipe ogee dan berdasarkan tujuan pembangunan untuk bagian dari sistem irigasi, maka bendungan Batubassi dikategorikan sebagai *single purpose dam*. Selain itu diketahui pula bahwa peranan bendungan Batubassi sangat penting di masa kolonial dalam menyelamatkan kondisi pertanian sawah serta meningkatkan cakupan area irigasi bagi kepentingan pertanian di Kabupaten Maros.

Kata Kunci: Karakteristik, bendungan, Batubassi, Maros, kolonial.

ABSTRACT

Asri Aisyah, " *The Batubassi Dam Structure as Remains of Dutch Colonial Periods in Maros Regency*" supervised by **Rosmawati** and **Yusriana**.

This study aims to determine the characteristics of the Batubassi dam and how its role in the Maros region in the Dutch colonial period. The problems raised are how characteristic of the Batubassi dam in Maros and how the role of the Batubassi dam in the Dutch colonial period. The research method used is an archaeological method with a Historical Archaeology approach. The research methodes stages are first data collection consisting of literature studies, field observations and interviews; the second is data processing and the third is data interpretation. After analyzing morphological and typological analysis methods, it was found that the Batubassi Dam Structure is a dam with river stone construction reinforced with a mixture of cement with a small dam type, ogee type weir and based on the purpose of development for part of the irrigation system, the Batubassi dam is categorized as a single purpose dam. In addition, it is also known that the construction of the Batubassi dam was very important in the colonial period in saving the condition of rice field farming and increasing the coverage of irrigation areas for agricultural purposes in Maros Regency.

Keyword : *Characteristics, Dams, Batubassi, Maros, Colonial.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada abad ke XV-XVI merupakan awal kehadiran VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) di Indonesia, dengan tujuan awal untuk melakukan perdagangan dan kemudian berubah menjadi penjajahan atau kolonialisasi. VOC berkuasa secara politis dan tempat tinggalnya bangsa-bangsa asing seperti Belanda turut mempengaruhi keberadaan unsur fisik kota-kota di Indonesia. Pertumbuhan kota-kota di Indonesia mengalami perkembangan sejak tahun 1870. Pada tahun 1800 sampai 1870 merupakan masa kejayaan perekonomian VOC, terutama disektor perkebunan dan perindustrian (Haerani, 2010).

Pada awal abad XX pemerintah Belanda mulai mencanangkan politik etis. Kebijakan ini diumumkan oleh Ratu Wilhelmina di depan parlemen Belanda dalam upaya mengatasi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat pribumi di Hindia Belanda (Pasandaran, 2005). Prinsip sederhana dari pidata Ratu Wilhemnia ini adalah Hindia Belanda harus dibangun. Pembangunan ini memerlukan modal yang tidak sedikit. Dengan slogan etis irigasi, edukasi, dan emigrasi langkah-langkah mengejar kesejahteraan harus segera dilakukan (Mawikere, 2002).

Politik etis membawa sedikit perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dimana ada tiga kebijakan baru yang diterapkan, yaitu pendidikan (*education*), irigasi (pengairan) dan emigrasi (perpindahan penduduk) (Susilo & Isbandiyah, 2018). Politik etis mengubah pandangan dalam politik kolonial yang beranggapan bahwa Indonesia tidak lagi sebagai *wingewest* (daerah yang menguntungkan) menjadi daerah

yang perlu dikembangkan sehingga dapat dipenuhi kebutuhannya. Dalam usaha untuk mengembangkan wilayah Indonesia pemerintah Belanda mulai banyak membangun bangunan-bangunan air dan melakukan program transmigrasi. Pembangunan bangunan air di antaranya pembangunan waduk, bendungan, bendung, embung, dan sebagainya. Pada masa itu kebanyakan pembangunan bangunan air adalah untuk keperluan irigasi (Rachmawan, 2018).

Satu hal yang menarik perdagangan melalui Makassar di paruh kedua abad ke-19 adalah adanya komoditas-komoditas utama yang diperdagangkan yang berbeda dengan anggapan selama ini. Komoditas seperti candu, tripang, kain, dan kopi adalah komoditas-komoditas yang nilainya mendominasi arus perdagangan ekspor dan impor. Komoditas ekspor tersebut ada yang memang berasal dari wilayah ini seperti kopi, tetapi ada juga yang dikumpulkan dari wilayah di sekitar Makassar seperti tripang (Ashabul Kahpi 2017; Sutherland 2009). Demikian pula, kain dan candu didatangkan untuk diekspor kembali dan untuk dikonsumsi secara lokal (Hidayatullah 2017). Yang mengherankan, komoditas beras bisa dikatakan tidak menonjol nilainya baik sebagai komoditas ekspor maupun impor di periode yang sama. Bisa jadi karena masih berlangsungnya perlawanan oleh Karaeng Bonto Bonto di Noorden Districten termasuk Maros yang dikenal sebagai penghasil beras menyebabkan kecilnya peranan komoditas ini (Pradadimara, 2017).

Masuknya VOC di Sulawesi Selatan menjadikan Makassar sebagai kota yang memiliki banyak peninggalan kolonial. Berkuasanya VOC sebagai penguasa tertinggi dan menguasai semua wilayah di Sulawesi Selatan, didasarkan atas adanya perjanjian yaitu Perjanjian Bungayya. Menurut salah satu isi perjanjian tersebut, yakni

pengaturan wilayah di bagian pemerintahan distrik-distrik, bagian utara (*afdeeling noorder districten*) memiliki bentuk berbeda. Bagian pemerintahan ini dibagi dalam tiga distrik pajak yaitu: Maros, Pangkajene dan Segeri serta distrik-distrik pegunungan. Pada masing-masing wilayah administrasi pemerintahan ini ditempatkan seorang *controleur*/penarik pajak, kecuali Maros yang berada langsung di bawah asisten residen Bagian Pemerintah Maros (Haerani, 2010)

Kedudukan Maros sebagai *Tumailalang Towa* dalam pemerintahan kerajaan Gowa, memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga menjadi sumber surplus beras, sebagai pintu gerbang bagi kerajaan Bone, dan menyebabkan kolonial Belanda melakukan ekspansi di wilayah ini. Selain itu dengan potensi sungai yang ada di Maros memiliki pengaruh dan peran yang sangat strategis (Asis, 1991).

Pada tahun 1723 merupakan awal kedatangan VOC di kota Maros dan pada saat itu belum melakukan kegiatan di daerah tersebut. Setelah VOC meninggalkan Makassar dan khususnya kota Maros, kemudian kedudukan VOC digantikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada saat kedatangan pemerintahan Hindia Belanda inilah yang kemudian melakukan ekspansi wilayah pada tahun 1824 dan telah menguasai daerah Maros sampai akhir pemerintahannya pada tahun 1942 (Makkasau, 1990).

Pemerintah Belanda banyak meninggalkan bukti fisik yang masih dapat dilihat sampai saat ini dan dari bukti tersebut dapat membuktikan betapa besarnya pengaruh pemerintah Belanda dalam pembentukan dan perkembangan Kota Maros. Sampai saat ini Kota Maros dijadikan sebagai tempat penelitian oleh para peneliti, arkeolog dan beberapa instansi daerah yang tertarik dengan tinggalan arkeologi terkait dengan

zaman prasejarah, sedangkan Kota Maros memiliki berbagai tinggalan arkeologi dari berbagai zaman yaitu dari prasejarah, kolonial dan islam.

Beberapa penelitian tentang bangunan kolonial sudah pernah dilakukan oleh Balai Arkeologi Makassar tetapi penelitian tentang bangunan air yang ada di Maros masih minim. Penelitian arkeologi kolonial tentang bangunan air pernah dilakukan di wilayah kerja Balai Arkeologi Makassar yang dilakukan Syahrudin Mansyur (2018) di Kabupaten Pinrang.

Dalam skripsi Jarnia Haerani (2010) dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat 25 bangunan kolonial di Kabupaten Maros, bangunan- bangunan tersebut berupa perkantoran, tempat tinggal, bangunan militer atau pertahanan, sarana umum, sarana peribadatan, sekolah, tempat pemakaman dan sarana pengairan (Bendungan Batubassi). Bendungan Batubassi ini merupakan bendungan induk yang nantinya akan mengalirkan air ke bendungan primer, sekunder, dan tersier. Bendungan Batubassi merupakan salah satu peninggalan zaman kolonial Belanda yang dibuat pada tahun 1919. Secara umum kondisi bangunan masih terpelihara sehingga pemanfaatannya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Bangunan ini terbuat dari campuran semen dan batu sungai dan didirikan membelah sungai dengan ukuran panjang sekitar 50 m. daerah irigasi Bantimurung mempunyai luas daerah sekitar 5.895 ha di bagian kanan (saluran induk Bantimurung) dan 618 ha di bagian kiri (saluran induk Sambueja).

Secara keseluruhan jumlah saluran premier dan sekunder pembawa pada daerah irigasi Bantimurung yaitu 46,107 km saluran induk memiliki panjang 9,41 km dan saluran sekunder 33,935 km. Saluran irigasi Bantimurung kanan memiliki 39 buah

bangunan bagi sadap dan sadap dengan 100 buah bangunan ukur, jembatan 53 buah, gorong-gorong pembawa 14 buah, bangunan pelimpah 2 buah, tangga cuci 2 buah, 2 tempat mandi hewan dan 3 buah bangunan suplesi yang terdapat di saluran induk dan sekunder serta 75 buah petak tersier (Sidra, 2012).

Bendungan dibagi menjadi beberapa macam tipe, antara lain bendungan berdasarkan ukurannya, bendungan berdasar tujuan pembangunannya, bendungan berdasar penggunaannya, bendungan berdasarkan jalannya air, bendungan berdasarkan konstruksinya, bendungan berdasar fungsinya, dan menurut ICOLD (*The International Commission on Large Dams*) (Rachmawan, 2018).

Sebagai gambaran mengenai bendungan masa kolonial Hindia-Belanda di Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada penelitian Mansyur (2018) yang menjelaskan bahwa irigasi yang terdapat di wilayah Ajatappareng memiliki dampak yang penting untuk peningkatan hasil pertanian padi. Pemerintah Belanda berinisiatif membangun irigasi Sadang di Sawitto (Pinrang). Rencana pembangunan irigasi terealisasi pada tahun 1937 di Benteng (Pinrang) dan mulai beroperasi pada tahun 1940. Pada masa kemerdekaan, untuk meningkatkan hasil pertanian padi, pemerintah Kabupaten Pinrang dan Sidenreng Rappang berinisiatif melakukan perbaikan bendungan.

Guna mengetahui gambaran penelitian ini diharapkan dapat mencari data-data yang terkait dan dapat menambah perbendaharaan data dan informasi mengenai bendungan yang dibangun pada masa kolonial serta menambah pengetahuan kita tentang dinamika kajian bendungan di Sulawesi Selatan. Serta dengan dilakukannya penelitian ini masyarakat setempat dapat mengetahui nilai-nilai penting pada

tinggalan kolonial ini Oleh karena itu, dalam penelitian ini, akan difokuskan pada bendungan Batubassi di Kabupaten Maros.

1.2 Rumusan masalah

Penelitian ini akan berusaha untuk menjawab permasalahan yaitu “Bendungan Batubassi Tinggalan Kolonial Belanda di Kabupaten Maros”. Untuk menjawab permasalahan ini maka penulis melakukan survei ke bendungan Batubassi untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik bendungan Batubassi di Maros?
2. Bagaimana peranan bendungan Batubassi pada periode kolonial Belanda?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui karakteristik bendungan Batubassi.
2. Mengetahui peranan bendungan Batubassi pada masa pemerintah kolonial Belanda.

Serta untuk menambah wawasan, penambahan data tentang bangunan air sebagai salah satu tinggalan arkeologi kolonial dan dapat berguna sebagai bahan referensi baru dan masyarakat mampu menjaga dan melestarikan tinggalan arkeologi maupun nilai-nilai yang terkandung dalam tinggalan arkeologi tersebut. Dengan demikian kelestarian dan keamanan tinggalan arkeologi tersebut akan lebih terjamin.

1.3.2 Manfaat

Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan ilmu, konsep serta teori terkait dengan ilmu arkeologi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta menambah wawasan, pengetahuan bagi civitas akademika pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Tinggalan arkeologi sebagai objek dalam penelitian ini apabila dapat diketahui fungsi dan peranan kiranya dapat memperoleh manfaat bagi perkembangan tinggalan arkeologi di Kabupaten Maros. Selain itu, manfaat yang dapat dihasilkan dari penelitian ini yaitu, mampu meningkatkan kesadaran masyarakat setempat, agar berperan serta dalam melestarikan dan menjaga warisan budaya.

1.4 Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi data.

1.4.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara.

a. Studi Pustaka

Penelitian ini diawali dengan melakukan pengumpulan data pustaka untuk mendapatkan referensi tentang penelitian yang pernah dilakukan melalui jurnal, laporan penelitian, artikel, skripsi dan tesis serta buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian.

Pengumpulan data pustaka juga dilakukan untuk mengetahui data historis mengenai sejarah bendungan dan kemungkinan alasan awal pembangunan bendungan ini serta peta lama Kabupaten Maros melalui media *online* Belanda (*Delpher*).

b. Observasi Lapangan

Observasi lapangan dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pendokumentasian secara langsung terhadap objek penelitian sehingga dapat dihasilkan data tentang keadaan fisik bangunan dan keadaan lingkungan sekitar. Data yang dihasilkan berupa deskripsi, foto, peta, dan gambar.

c. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mengetahui perubahan dan pengaruh bendungan serta irigasi terhadap masyarakat. Teknik wawancara yang akan dilakukan adalah teknik wawancara terbuka agar informan lebih leluasa dalam memberikan jawaban atau keterangan.

1.4.2 Pengolahan dan Interpretasi data

Data yang diperoleh melalui hasil observasi lapangan, studi pustaka dan wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis histori. Sumber-sumber historis berupa catatan-catatan Belanda, peta lama, dan keterangan-keterangan tambahan yang bersumber dari hasil wawancara akan dianalisis untuk memperoleh berbagai informasi tentang lokasi penelitian. Kemudian digabungkan dengan kemudian data tersebut akan dideskripsikan. Data yang telah dideskripsikan ini akan diperjelas menggunakan foto sehingga akan dapat memberikan informasi dengan jelas. Dari deskripsi ini akan dilakukan pembahasan sehingga dapat menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan dan pertanyaan yang penulis ajukan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diuraikan dalam bentuk bab-bab dengan pembahasan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I berjudul “Pendahuluan” berisi latar belakang penelitian, uraian terkait penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian ini, baik yang dikutip dari skripsi, tesis, disertasi, artikel dan jurnal. Selain itu, pada bab ini juga terdapat rumusan masalah, pertanyaan penelitian, manfaat, tujuan, sistematika penulisan dan tinjauan pustaka.

Bab II berjudul “Profil Wilayah Penelitian” penelitian berisikan tiga poin utama yakni profil wilayah, sejarah dan deskripsi operasional.

Bab III berjudul “Deskripsi Data Penelitian” memuat uraian data lapangan, baik itu deskripsi situs, lingkungan dan temuan arkeologis.

Bab VI berjudul “Pembahasan” yang memuat analisis data dan pembahasan

Bab V berjudul “Penutup” yang memuat kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian.

1.6 Tinjauan Pustaka

Bendungan berasal dari kata bendung dimana bendung berarti pengempang untuk menahan air di sungai, sedangkan bendungan berarti bangunan penahan atau penimbun air untuk irigasi (Anonim, 1989). Sebuah bendungan berfungsi sebagai penangkap air dan menyimpannya di musim hujan waktu air sungai mengalir dalam jumlah besar dan yang melebihi kebutuhan baik untuk keperluan irigasi, air minum,

industri atau yang lainnya. Berbeda dengan fungsi sebuah bendung yang tidak dapat menyimpan air melainkan hanya untuk meninggikan muka air sungai dan mengalirkan sebagian aliran air sungai yang ada ke arah tepi kanan dan/ atau kiri sungai untuk mengalirkannya kedalam saluran melalui sebuah bangunan pengambilan jaringan irigasi (Sidharta 1997,166).

Bangunan irigasi pertama di Indonesia dibangun di Jawa Timur, terbukti dengan prasasti Harinjing yang saat ini disimpan di sebuah museum di Jakarta. Informasi dari prasasti tertua di Indonesia juga menyebutkan bahwa saluran air tertua dibangun pada abad ke-5 Masehi. di Desa Tugu dekat Cilincing (Erman, 2007).

Bendungan irigasi pertama di Indonesia dibangun di Jawa Timur yaitu Bendungan Sampean di Sungai Sampean. Orang Irlandia Van Thiel, dikirim ke Situbondo oleh pemerintah Belanda, membangun bendungan pada tahun 1832 dari struktur kayu jati berisi batu sungai dengan bentang 45 meter dan tinggi 8 meter. Antara tahun 1852 sampai 1857 dibangun Bendungan Lengkong di Mojokerto seluas 34.000 hektar (Erman, 2007).

Bendungan Glapan di Sungai Tuntang di Jawa Tengah dibangun pada tahun 1852 dan selesai pada tahun 1859. Namun, baru dapat dioperasikan 20 tahun kemudian, yakni pada tahun 2008. 1880-1890. Bendungan Glapan adalah bendungan pertama yang dibangun di bawah pemerintahan kolonial untuk tanaman manusia (Erman, 2007).

Selain itu, juga dicatat bahwa setelah pembentukan departemen BOW oleh pemerintah Hindia Belanda, "Irrigatie-Afdeling" mulai terbentuk. Tepatnya terdaftar pada 1 Januari 1889 adalah kabupaten irigasi pertama, yaitu Irrigatie-Afdeling

Serayu, yang meliputi pemukiman Banyumas dan Bagela di Jawa Tengah. Kemudian Irigasi-Afdeling Brantas yang meliputi wilayah Malang-Kediri-Surabaya pada tahun 1982, dan Irigasi-Afdeling Serang yang meliputi wilayah Semarang-Demak dan Purwodad. Dengan semua itu, pada tahun 1910 pulau Jawa terbagi seluruhnya menjadi daerah irigasi (Erman, 2007).

Berdasarkan tulisan Shidarta tahun 1997 (168-182) bendungan dapat dibagi menjadi beberapa macam tipe, antara lain:

1. Tipe bendungan berdasarkan ukurannya:

a. Bendungan besar (*Large Dams*).

Panjang puncak bendungan tidak kurang dari 500 meter, Kapasitas waduk yang terbentuk tidak kurang dari 1 juta m². Debit banjir maksimum yang diperhitungkan tidak kurang dari 2000 m³/detik.

b. Bendungan kecil (*Small Dam*)

Semua bendungan yang tidak termasuk sebagai bendungan besar.

2. Tipe bendungan berdasar tujuan pembangunannya.

a. Bendungan dengan tujuan tunggal (*Single purpose dam*). Adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi satu tujuan saja,

b. Bendungan serba guna (*multi purpose*) adalah bendungan yang dibangun untuk memenuhi beberapa tujuan,

3. Tipe bendungan berdasar penggunaannya

a. Bendungan untuk membentuk waduk (*storage dam*) adalah bendungan yang dibangun untuk membentuk waduk guna menyimpan air waktu kelebihan agar

dapat dipakai pada waktu diperlukan.

b. Bendungan penangkap/pembelok air (*diversion dam*) bendungan yang dibangun agar permukaan airnya lebih tinggi sehingga dapat mengalir masuk kedalam saluran air atau terowongan air.

c. Bendungan untuk memperlambat jalannya air (*detention dam*) adalah bendungan yang dibangun untuk memperlambat jalannya air, sehingga dapat mencegah banjir besar.

Sejauh ini penelitian yang berfokus terhadap bendungan tinggalan kolonial Belanda ada 2 yaitu, bendungan benteng di Kabupaten Pinrang yang dilakukan oleh Syahrudin Mansyur pada tahun 2018 dan bendungan langkemme di Kabupaten Soppeng yang dilakukan oleh Anriani Nurul Maghfira tahun 2018.

Bangunan Bendung memiliki panjang 94 meter, dan dilengkapi 8 (delapan) buah bukaan pintu gerak *type Vlacto Scharif* (MAN) dengan lebar masing-masing 10 meter dan tinggi 7,75 meter dari pintu doble yang terdiri atas; bagian bawah dengan tinggi 5,75 (lima, tujuh puluh lima) meter dan bagian atas 2 (dua) meter. Berat pintu keseluruhan adalah ± 5 ton/m, dimana tinggi muka air terbendung dapat mencapai $\pm 21,75$ meter. Keseluruhan pintu di Bangunan Bendung digerakkan dengan tenaga listrik, dimana setiap 2 (dua) pintu dilengkapi 1 (satu) rumah mesin. Bangunan Bendung memiliki 4 Mercuri dengan tinggi masing-masing Mercuri yaitu 14 meter. (Mansyur, 2018)

Kompleks Bendung Benteng terdiri atas, dua intake (bangunan pengambilan) bagi saluran utama yaitu intake sebelah kanan (Sadang Utara) untuk Saluran Induk Pekkabata dan intake sebelah kiri (Sadang Selatan) untuk Saluran Induk Sawitto dan Saluran Induk Rappang. Masing-masing intake memiliki *Spuypand* atau Kantong Lumpur dan *Spuykanal* yaitu *Spuypand Intake* Selatan sepanjang 450 meter, sementara *Spuypand Intake* Utara sepanjang 200 meter. *Intake* untuk Saluran Induk Sawitto dilengkapi dengan *system Crump de Gruyter* dan *Intake* untuk Saluran Induk Rappang dilengkapi dengan *system Ventury Meter*. (Mansyur, 2018)

Sedangkan pada Bendungan Langkemme, dari penelitian yang dilakukan Pembangunan Bendung Langkemme di Kabupaten Soppeng dilatarbelakangi oleh perekonomian nasional, adanya perencanaan pengembangan di daerah Sulawesi Selatan, perekonomian daerah, pengembangan daerah, dan adanya kebutuhan irigasi. pembangunan Bendung Langkemme tahun 1988 sampai 1995 dilakukan pembuatan seperti saluran suplesi, saluran induk, saluran sakunder, saluran irigasi kecil, saluran pembuangan, dan pengadaan kelengkapan operasi pemeliharaan. (Maghfira, Patahuddin, & Najamuddin, 2018)

Komponen-komponen Bendung Langkemme meliputi tubuh bendung dengan tipe silinder, pintu pengambilan, pintu penguras, kantong lumpur, dan bangunan pelengkap lain. Untuk pengoprasian Bendung Langkemme dilakukan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Soppeng Selatan yang pengelolaannya dikelola oleh pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang. Tahun 1995 struktur organisasi yang mengelola Bendung Langkemme bernama Ranting Dinas

kemudian tahun 2001 Ranting Dinas diubah menjadi Kantor UPTD PSDA Soppeng Selatan. Dampak keberadaan Bendung Langkemme bagi masyarakat di Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liriaja, Ganra dan Lirilau yaitu bertambahnya luas persawahan beririgasi, meningkatnya hasil produksi pertanian yang berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat. (Maghfira, Patahuddin, & Najamuddin, 2018)

BAB II
PROFIL WILAYAH PENELITIAN DAN SEJARAH SINGKAT
KABUPATEN MAROS

2.1 Letak dan Kondisi Geografis

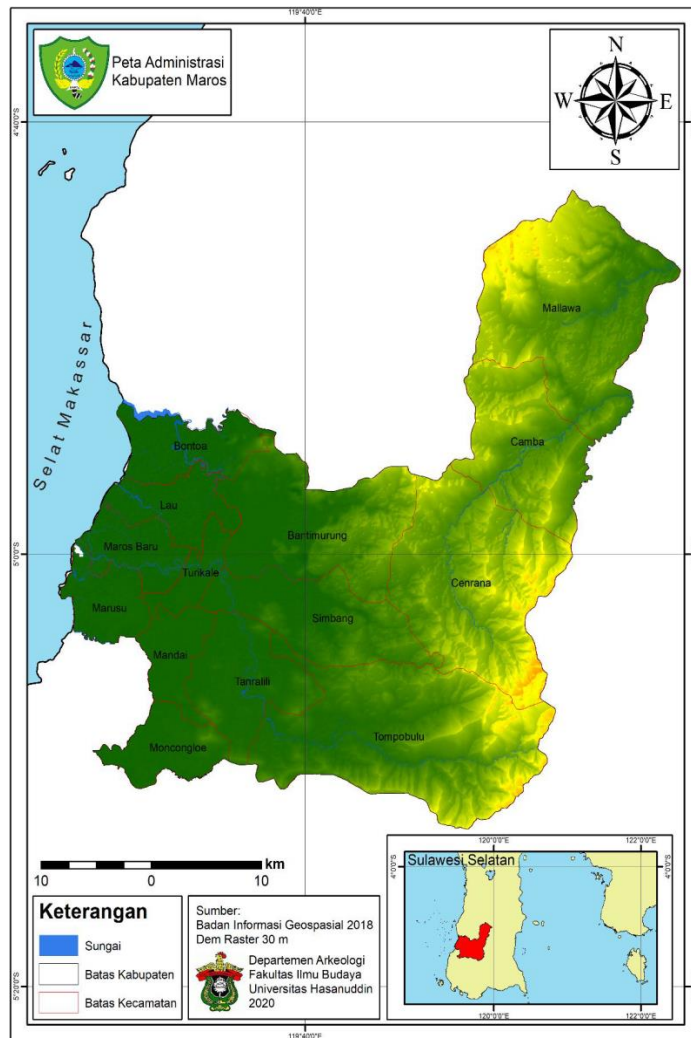
2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Maros merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, terletak di bagian barat Sulawesi Selatan. Secara umum luas wilayah Kabupaten Maros kurang lebih 1.525,54 km². Secara astronomis Kabupaten Maros terletak pada 40° 45' 50" 07' LS dan 109° 205'-129° 12' BT (Maros dalam angka, 2018).

Secara geografis Kabupaten Maros berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep;
- b) Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa;
- c) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone;
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar;

Ibukota Kabupaten Maros terletak 30 km arah utara Kota Makassar, Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan. Letak Kabupaten Maros yang berdekatan dengan Kota Makassar merupakan potensi bagi pengembangan berbagai kegiatan produksi dan ekonomi. Kabupaten Maros berada pada rentang ketinggian antara 0 sampai dengan ±1000 m di atas permukaan laut (Maros dalam angka, 2018).



Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Maros
Sumber. Riska Faradilla Nazar, 2020

Berdasarkan pencatatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Maros adalah 27,3°C tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 22,5°C sedangkan paling tinggi adalah 34,8°C. Iklim Kabupaten Maros tergolong iklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata sekitar 297 mm setiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 170 hari

selama tahun 2014, dengan rata-rata suhu udara minimum 24,1°C dan rata-rata suhu udara maksimum 31,8°C. Secara administratif, Kabupaten Maros terdiri atas 14 Kecamatan, 105 Desa dan 23 Kelurahan (Nazar, 2020).

2.1.2 Kependudukan

Penduduk kabupaten Maros berjumlah 318.238 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 155.761 jiwa dan perempuan sebanyak 162.477 jiwa. Mayoritas warganya berasal dari suku/etnis bugis makassar dan mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam (Maros dalam angka, 2018).

2.1.3 Geomorfologis

Kabupaten Maros terbagi dalam empat satuan geomorfologi, sebagai berikut:

- a) Satuan pegunungan vulkanik: menempati bagian utara, tengah dan timur puncak tertinggi Bulu Lekke (1.361 mdpl) menempati luas 30% dari luas daerah Kabupaten Maros. Relief topografi, tinggi kemiringan, lereng terjal, tekstur topografi kasar. Batuan penyusunnya yaitu batuan gunung api.
- b) Satuan perbukitan vulkanik: Intrusi dan sedimen. Menempati daerah perbukitan yang menyebar secara setempat-setempat sekitar 15% dari luas Kabupaten Maros. Batuan penyusunnya, batuan vulkanik, beku (intrusi) dan sedimen.
- c) Satuan perbukitan Karst: Satuan perbukitan ini tersebar cukup luas pada bagian tengah, timur laut daerah Kabupaten Maros, luas sekitaran 30%. Relief topografi karst membentuk tower-tower dengan relief yang kasar. Batuan penyusunnya, batu gamping (batu kapur).

- d) Satuan Pedataran Alluvium: Terletak dibagian barat yang tersebar dengan arah utara-selatan, menempati sekitar 25% dari luas daerah Kabupaten Maros. Topografi datar, relief rendah, tekstur topografi halus. Batuan penyusunnya, batuan endapan aluvial.

Jenis tanah berdasarkan hasil identifikasi yang pernah dilakukan di Kabupaten Maros terdapat lima jenis tanah yang tersebar di beberapa daerah seperti jenis tanah aluvial, litosol, mediteran dan podsolik. Jenis tanah aluvial biasanya berwarna kelabu, coklat atau hitam. Jenis tanah ini tidak peka terhadap erosi karena terbentuk dari endapan laut, sungai atau danau dan jenis tanah ini terdapat di sepanjang pantai sebelah barat Kabupaten Maros, luas penyebarannya 56.053 ha atau 34%.

Jenis tanah litosol terbentuk dari batu endapan, batuan beku, jenis tanah ini mempunyai sifat beraneka ragam dan sangat peka terhadap erosi serta kurang baik untuk tanah pertanian, luas penyebarannya 51.498 ha atau 31%. Jenis tanah mediteran terbentuk dari batu endapan berkapur, batuan baku basis, intermedion dan metamorf, jenis tanah ini berwarna merah sampai coklat dan kurang peka terhadap erosi, luas persebarannya 45.632 ha atau 28%.

Jenis podsolik terbentuk dari batuan endapan dan bekuan berwarna kuning sampai merah mempunyai sifat asam dan peka terhadap erosi. Jenis tanah ini dapat dijadikan tanah pertanian, perkebunan. Jenis tanah ini terdapat di daerah berbukit sampai bergunung, luas persebarannya 8.729 ha atau 5% dan jenis tanah latosol mempunyai luas persebaran 17.862 ha atau 11% (Maros dalam angka, 2018).

Ketinggian suatu tempat dari permukaan laut terutama di daerah tropis dapat menentukan banyaknya curah hujan dan suhu. Ketinggian juga berhubungan erat

dengan konfigurasi lapangan, unsur-unsur curah hujan, suhu dan konfigurasi lapangan mempengaruhi peluang pembudidayaan komoditas. Ketinggian wilayah di Kabupaten Maros berkisar antara 0-2000 meter dari permukaan laut. Di bagian barat wilayah Kabupaten Maros dengan ketinggian 0-25 meter dan di bagian timur dengan ketinggian 100-1000 meter lebih. Pada Kabupaten Maros dengan ketinggian 0-25 m merupakan daerah yang dominan dengan luas wilayah 63.083 ha atau sebesar 39% sedangkan daerah yang memiliki luas daerah yang sempit berada pada ketinggian >1000 m dengan luas wilayah 7.193 ha atau sebesar 4% dari luas total wilayah perencanaan (Nazar, 2020).

2.1.4 Sosial Budaya

Kabupaten Maros selain menjadi perlintasan dari Makassar ke Toraja, juga merupakan daerah peralihan dan pertemuan dari dua kebudayaan dari etnik Bugis dan Makassar. Budaya masyarakat Maros diwarnai oleh budaya Bugis dan Makassar itu sendiri, yang saling isi mengisi dan akhirnya menjadi tipikal perpaduan atau akulturasi yang memunculkan kekhasan budaya baru. Nuansa budaya Bugis dapat ditemukan di bagian timur, utara, dan tengah dari wilayah Maros, sedangkan nuansa budaya Makassar dapat ditemukan di bagian selatan dan barat dari wilayah Maros. Di desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Maros, terdapat penggunaan tutur bahasa *Dentong* yang mana begitu berbeda dengan bahasa Bugis dan bahasa Makassar. (Nazar, 2020)

Kabupaten Maros melahirkan unsur-unsur budaya yang berupa perpaduan antara nilai-nilai agama dan lingkungan alamnya yang dilatarbelakangi dan diwarnai dua etnis besar Makassar dan Bugis. Kedua etnis ini telah membentuk watak dan

karakteristik masyarakat Kabupaten Maros yang mudah berinteraksi terhadap masyarakat pada umumnya di Sulawesi Selatan (Nazar, 2020)

Jika dilihat dari sejarah Kabupaten Maros yang termasuk keturunan dari kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar melalui suatu kaitan perkawinan. Hal inilah yang melahirkan suatu nilai-nilai budaya dan tradisi yang sampai saat ini masih dijunjung tinggi oleh kalangan masyarakatnya. Sebagai tanda-tanda tersebut dapat dilihat dari nama-nama kegiatan budaya yang pada dasarnya berasal dari bahasa Makassar dan/atau Bugis. Kekayaan budaya Kabupaten Maros juga memiliki potensi dan bahkan menjadi bagian dari kegiatan pariwisata karena budaya dan pariwisata adalah suatu bagian yang tidak dapat terpisahkan. Beberapa ekspresi budaya yang dituangkan dalam suatu bentuk kegiatan-kegiatan yang mencerminkan kehidupan manusia masa lampau di Kabupaten Maros (Nazar, 2020).

Budaya *Siri' Na Pacce* atau *Siri' Sibawang Pesse* adalah salah satu filosofi budaya Masyarakat Bugis-Makassar yang harus dijunjung tinggi. Bagi masyarakat Bugis-Makassar di Kabupaten Maros, *siri'* mengajarkan moralitas dalam bentuk nasihat kesusilaan, pelarangan, hak dan kewajiban yang mendominasi tindakan manusia untuk melestarikan dan membela diri dan kehormatannya. *Siri'* adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi martabat manusia, *siri'* adalah sesuatu yang tabu bagi orang-orang Bugis-Makassar dalam berinteraksi dengan orang lain. Sementara itu, *Pacce/Pesse* mengajarkan solidaritas dan kepedulian sosial secara tidak egois dan ini adalah salah satu konsep yang membuat orang Bugis-Makassar mampu bertahan dan dihormati diperantauan.

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Maros adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat dua bahasa yang digunakan masyarakat di daerah Kabupaten Maros yaitu bahasa Makassar dan bahasa Bugis, khususnya dialek *Dentong* (Nazar, 2020).

2.2 Sejarah Singkat Kabupaten Maros

Maros merupakan suatu wilayah yang terbentang cukup luas mulai dari sebelah Selatan Kota Makassar dan melebar ke Barat sampai tepi Selat Makassar. Sekitar awal abad XV di Maros berdiri sebuah Kerajaan yang cukup besar dan berpengaruh, dikenal dengan nama Kerajaan Marusu. Kerajaan Marusu cukup berpengaruh karena di samping letaknya yang strategis, yaitu di antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone, juga karena prinsipnya dalam menjalankan tata kehidupan politik yang tidak disertai ambisi melebarkan sayap kekuasaan. Hal ini disebabkan karena Kerajaan Marusu memiliki keadaan hidup yang sederhana dan tidak hidup dengan mewah yang bersumber dari hasil tebusan pengorbanan-pengorbanan rakyatnya. Kerajaan Marusu juga mempunyai sifat *tepa selira (dapat merasakan perasaan orang lain)*. Hal tersebutlah yang menyebabkan Kerajaan Marusu senantiasa menjadi rebutan perhatian Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone, dua kerajaan besar yang saat itu memegang hegemoni politik di Sulawesi Selatan. Bukan untuk dijadikan negara jajahan tetapi untuk dijadikan sekutu dalam menjalankan tata kehidupan politik. Kerajaan Marusu dihuni oleh suku Bugis dan Makassar, tetapi pada hakekatnya Kerajaan Marusu didominasi oleh suku Bugis Makassar, sebab disamping karena bahasa yang dipergunakan juga karena Kerajaan Marusu memang diidentifikasi sebagai salah satu negeri "*To Mangkasara*" (orang Makassar)

sebagaimana halnya dengan Gowa, Takalar, Galesong, Bantaeng, Topejawa, Laikang, Binamu, dan Bangkala (Nazar, 2020).

Dalam Lontara Patturioloanga Ri Gowa tercatat adanya sebuah Kerajaan yang bernama Kerajaan Marusu. Kapan berdirinya tidak diketahui secara tepat, tetapi dapat diperkirakan Kerajaan Marusu berdiri dengan Raja Pertama Karaeng Loe Ri Pakere ketika di Kerajaan Gowa mulai surut pemerintahan I Pakere Tau Tunijallo Ri Passukki Raja Gowa VIII jadi sekitar tahun 1463. Setelah Belanda berhasil mematahkan perlawanan sebagian besar kekuatan pertahanan dan perlawanan Raja-raja di Sulawesi Selatan termasuk Kerajaan Marusu, maka situasi Kerajaan Marusu pun mengalami perubahan, termasuk corak dan bentuk pemerintahannya. Bukan lagi sebuah kerajaan murni, tetapi hanya sebuah kerajaan kecil berbentuk adat *Regentschap/Gemenschap* dengan kepala pemerintahan bergelar *Karaeng* yang merupakan Raja Tak Bermahkota (*onttronde forsten*) tidak seperti sebelumnya, dan Marusu sendiri terpecah menjadi beberapa Kerajaan kecil sehingga Marusu tinggal tersisa 36 kampung. Perubahan ini ditandai oleh penyerahan tahta dari Kare Yunusu sebagai raja Marusu terakhir Kerajaan Marusu Besar kepada La Mamma Daeng Marewa.

Kerajaan-kerajaan yang baru berdiri di wilayah Kerajaan Marusu ialah Simbang, Bontoa, Tanralili, Raya, Lau' dan Turikale yang semuanya berdiri pada Abad XVIII. Namun selanjutnya untuk menggalang persatuan kembali keutuhan wilayah di Marusu, La Mamma Daeng Marewa Karaeng Marusu mengajak Raja-Raja dari Kerajaan tersebut membentuk sebuah Forum Komunikasi Lembaga Adat yang kemudian dikenal dengan sebutan *Toddo Limaya Ri Marusu*. Awalnya yang

menjadi anggotanya ialah Marusu, Bontoa, Tanralili, Simbang dan Raya (Lima Kerajaan) tetapi selanjutnya Simbang dilebur menjadi satu dengan Turikale dan Raya dilebur ke dalam Lau', sehingga Turikale dan Lau' masuk menggantikan Simbang dan Raya. Pada awal Abad XX, Simbang kembali melepaskan diri, sehingga kembali menjadi bagian dari *Toddo Limaya Ri Marusu* menggantikan Tanralili yang di kelompokkan bersama dengan daerah-daerah *Gallarang Appaka* oleh Pemerintah Belanda.

Pada awalnya sekitar permulaan Abad XVI yaitu ketika duduk bertahta Raja Gowa IX yang bernama I Daeng Matanre Karaeng Mangnguntungi Tumapa'Risi Kallongna yang memerintah 1510-1546, Kerajaan Marusu diserang dan dijadikan sebagai sebuah negara sekutu, bahkan selanjutnya Kerajaan Marusu berperan membantu Gowa menaklukkan Panaikang, Mandalle dan Cempaga. Kemudian Raja Marusu I bergelar Karaeng Loe Ri Pakere membuat perjanjian persahabatan dengan I Daeng Matenre Karaeng Mangnguntungi Tumapa' Risi Kallongna Raja Gowa IX dengan La Olio Botee Matinroe Ri Itterung Raja Bone VI serta dengan Raja Polong Bangkeng bergelar Karaeng Loe Ri Bajeng (Nazar, 2020).

Namun ketika Kerajaan Gowa berperan melawan Kerajaan Tallo yang ketika itu diperintah oleh I Mangngayoang Berang Karaeng Pasi, Kerajaan Marusu justru membantu Tallo. Yang menjadi Raja Marusu ketika itu I Mappasomba Daeng Nguraga Karaeng Patanna Langkana Raja Marusu IV. Kerajaan Marusu justru membantu Tallo, padahal sebelumnya antara Marusu dan Gowa terikat oleh sebuah perjanjian persahabatan, bahkan akibat dari perjanjian itu Raja Marusu menjadi *Tumailalang* di Kerajaan Gowa. Hal tersebut terjadi karena hubungan kekeluargaan

yang sangat dekat. I Mappasomba Daeng Nguraga Karaeng Patanna Langkana Raja Marusu IV bersaudara kandung dengan Permaisuri Raja Tallo bernama I Pasilembang Tumamalianga Ri Tallo, keduanya adalah anak dari Karaeng Loe Ri Marusu Raja Marusu III.

Dalam pertempuran tersebut Raja Gowa IX Tumpa' Risi Kallongna mengerahkan laskarnya di bawah tiga panji Kebesaran Kerajaan Gowa. Masing-masing laskar tersebut adalah laskar di bawah pimpinan Karaeng Lakiung dengan Panji Garuda yang beranggotakan Mangasa, Tombolo, Lakiung dan Saumata. Laskar ini menghadapi laskar Polongbangkeng di daerah Baro' Boso (Polongbangkeng pun membantu Tallo dan langsung dipimpin oleh raja bernama Daenna I Pasairi Raja Polongbangkeng II). Laskar yang berada di bawah Panji Sulengkayya terdiri atas laskar Sudiang, Manuju, dan Borisallo menghadapi laskar Tallo di daerah Rappocini, sedangkan laskar yang berada di bawah Panji Cakkuridia yang terdiri atas laskar Data, Pattalasang, Bontomanai dan Paccelekang menghadapi laskar Marusu di daerah Tamamangung.

Meskipun akhirnya Tallo bersama sekutunya Marusu dan Polongbangkeng mengalami kelelahan namun berhasil memulihkan kembali hubungan kekeluargaan antara Kerajaan Gowa dan Tallo, bahkan ditandai dengan lahirnya sebuah perjanjian dan sumpah keramat antara Kerajaan Gowa dan Tallo, Sumpah Keramat itu berbunyi: *"Ia iannamo Ampasiccalai Gowa na Tallo, lama nacalla Rewata"* artinya Barang siapa yang mengadu dombakan antara Gowa dan Tallo akan dikutuk oleh Dewata. Perjanjian inilah yang mempersatukan kembali antara Kerajaan Gowa dan Tallo yang

pada hakekatnya memang Kerajaan Kembar (*zusterstaten*), sebab Raja Gowa IV Karaeng Tu Natangka' Lopi sebelum wafat membagi dua kerajaannya.

Dengan lahirnya Perjanjian Perdamaian antara Kedua Kerajaan, maka Kerajaan Tallo menjadi bagian yang terintegrasi/terpisahkan dengan Kerajaan Gowa, sesuai konsepsi *Rua Karaeng Se're Ata* (Dua Raja Satu Hamba). Begitu pun dengan Kerajaan Marusu kembali menjadi teman yang dekat dengan kedua Kerajaan itu.

Sebagaimana kita ketahui sebuah kerajaan juga mengenal sistem stratifikasi sosial, dimana tingkatan ini mulai dikenal setelah kedatangan Tomanurung. Keturunan langsung Tomanurung merupakan satu lapisan terdiri yang akhirnya disebut bangsawan. Adapun stratifikasi sosial bagi masyarakat di Kerajaan Marusu secara umum terbagi atas:

- a) *Ana' Karaeng/Ana' Arung* (Golongan Bangsawan)
- b) *Tumaradeka/To Maradeka* (Golongan Rakyat Biasa)
- c) *Ata* (Golongan Hamba Budak)

Ketiga kelompok besar ini pun masih terbagi atas beberapa golongan, yaitu:

- a) *Ana' Karaeng/Ana' Arung* (Golongan Bangsawan). Golongan ini terdiri dari:
 - *Ana' Ti'no/Ana' Matase*, yaitu anak yang terlahir dari ayah maupun ibunya berdarah bangsawan murni.

Golongan ini terdiri lagi atas dua tingkatan yakni:

- *Ana' Pattola/Ana' Mattola*, adalah anak yang terlahir dari ayah seorang raja yang sementara bertahta dan ibu seorang permaisuri, sehingga anak ini menjadi calon utama pengganti ayah.

- *Ana' Manrapi*, adalah anak yang dapat diangkat menjadi raja jikalau tidak ada ana' pattola/mattola, disebut demikian karena anak tersebut adalah putra raja
- *Ana' Sipuwe* atau bangsawan berdarah setengah terdiri pula atas dua golongan, yaitu :
 - *Ana' Sipuwe Manrapi*, adalah anak yang dapat diangkat menjadi raja jika tidak ada ana' pattola dan anak manrapi atau kedua-duanya ada namun dianggap tidak cakap dalam mengendalikan pemerintahan atau mempunyai cacat lahir. Disebut *Ana' Sipuwe Manrapi*, karena terlahir dari ayah golongan ana' ti'no/matase (*Ana' pattola/mattola* atau *ana' manrapi*) tetapi ibunya dari golongan ana' sipuwe manrapi atau ana' sipuwe.
 - *Ana' Sipuwe* dalam arti sempit, yaitu anak yang terlahir dari perkawinan antara

Ayah ana' ti'no/matase, Ibu golongan *Tumaradeka Tubaji* dan Ayah ana' sipuwe manrapi, Ibu golongan ana' sipuwe.

- *Ana' Cera/Ana' Dera* adalah anak yang terlahir dari perkawinan antara Ayah golongan ana' ti'no (*ana' pattola/matase* atau *ana' manrapi*) dan Ibu golongan *Ata* atau golongan budak atau pun Ayah golongan ana' sipuwe tetapi Ibu golongan *Tumaradeka Tusamara/Tu Sama'*. Golongan ini sama sekali sudah tidak berhas atas tahta.
 - *Ana' Karaeng Sala* adalah anak yang lahir dari Ayah ana' sipuwe atau ana' cera' dan Ibu golongan *Ata* (Budak).
- b) *Tumaradeka/To Maradeka* (Golongan Rakyat Biasa). Kasta atau golongan ini terdiri dari dua tingkatan yaitu :

- *Tubaji/Tu Deceng* adalah golongan rakyat biasa terhormat atau tidak diperhambakan. Golongan ini seringkali juga menggunakan gelar Daeng di belakang namanya. Dalam pemerintahan golongan ini biasanya menjabat sebagai *Gelarang/Matowa* atau Kepala Kampung.
 - *Tusamara'/To Sama'* adalah golongan kebanyakan/rakyat lapisan terbawah yang tidak berhak menggunakan tambahan nama Daeng di belakang namanya, terkecuali sebagai penghargaan karen diperistrikan oleh seorang bangsawan.
- c) *Ata* (Golongan Hamba/Budak). Golongan ini ialah Budak/Hamba Sahaya yang mengabdikan pada Raja/Bangsawan, golongan ini terdiri dari dua yaitu :
- *Ata Sossorang/Ata Mana'* adalah budak atau hamba sahaya yang diwariskan secara turun temurun, sebagaimana halnya dengan barang pusaka/warisan.
 - *Ata nibuang/Ata Ma'buang* adalah golongan yang dijadikan budak karena sesuatu kesalahan atau aib yang diperbuatnya atau karena menjadi tawanan perang, sehingga dijadikan budak oleh yang menawaninya.

Stratifikasi sosial diatas sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat di Kerajaan Marusu. Namun ketika Marusu mulai dikuasai secara total oleh Belanda nampaknya untuk kedudukan tahta, pemerintah Belanda tidak terlalu memperhatikan ketinggian derajat kebangsawanan namun lebih menitikberatkan kepada siapa dekade akhir di Marusu, khususnya *Toddo Limaya Ri Marusu*, kebangsawanan identik dengan derajat darah kebangsawanan, sehingga untuk mengetahui derajat kebangsawanan seorang Raja/Bangsawan adalah memeriksa silsilah keturunannya.

2.3 Kolonialisasi di Kabupaten Maros

Kedatangan VOC di Makassar menjadikan Makassar sebagai kota yang memiliki banyak peninggalan kolonial. Berkuasanya VOC sebagai penguasa tertinggi dan menguasai semua wilayah di Sulawesi Selatan, didasarkan atas adanya perjanjian yaitu *Perjanjian Bungayya*. Menurut salah satu isi dari perjanjian tersebut, yakni pengaturan wilayah di bagian pemerintahan Distrik-distrik Bagian Utara (*afdeeling noorder districten*) memiliki bentuk yang berbeda. Bagian pemerintahan ini dibagi dalam tiga distrik pajak (*pachtdistrict*) yaitu: Maros, Pangkajene dan Segeri dan distrik-distrik pegunungan (*bergregent-schappen*). Pada masing-masing wilayah administrasi pemerintahan ini ditempatkan seorang *controleur*, kecuali Maros yang berada langsung di bawah asisten residen Bagian Pemerintahan Maros (Poelinggomang, 2004: 42).

Kedudukan daerah Maros sebagai *Tumailalang Towa* dalam pemerintahan kerajaan Gowa, memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga menjadi sumber surplus beras, sebagai pintu gerbang bagi kerajaan Bone, dan menyebabkan kolonial Belanda melakukan ekspansi di wilayah ini (Barbara Sillars Harvey, 1989 dalam Asis, 1991). Selain itu, dengan potensi sungai yang ada di Maros, yaitu sungai Maros yang cukup luas, panjang (terdiri dari beberapa anak sungai), memiliki pengaruh dan peran yang sangat strategis sehingga kolonial Belanda berkeinginan untuk mendirikan sekolah angkatan laut atau pelayaran dengan nama "MAROS" tepatnya di daerah yang diberi nama Labuang. Tetapi pada saat peristiwa Perang Dunia II terjadi dan kolonial Belanda dikalahkan oleh Jepang, maka keinginan Belanda tersebut tidak terlaksana.

Pada tahun 1723 merupakan awal kedatangan VOC di kota Maros dan pada saat itu belum melakukan kegiatan apapun di daerah tersebut. Setelah VOC meninggalkan Makassar dan khususnya kota Maros, kemudian kedudukan VOC digantikan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Pada saat kedatangan Pemerintah Hindia Belanda inilah yang kemudian melakukan ekspansi wilayah pada tahun 1824 dan telah menguasai daerah Maros sampai akhir masa pemerintahannya pada tahun 1942 (Makkasau, 1990:35).

Bukti fisik sarana atau fasilitas yang pernah dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Kota Maros, di antaranya berupa bangunan perkantoran, rumah jabatan atau rumah pribadi, jaringan jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah, penjara, sistem drainase (bendungan, bak penampungan air, saluran pembuangan air), gereja dan tempat pemakaman (*kerkhoff*) (Haerani, 2010).